

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Indonesia. Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12'' Lintang Selatan – 8,48' Lintang Selatan dan antara 111,0' Bujur Timur – 114,4' Bujur Timur. Provinsi Jawa Timur tentunya memiliki kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tentunya berjumlah 38 yang dimana terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentunya mempunyai sebuah kewenangan untuk mengatur daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Sesuai dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur didalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. “pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal”. Dalam Undang-Undang tersebut, Otonomi daerah pada era ini pemerintah pusat memberikan kebijakan yang lebih luas dalam mengendalikan rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat guna mengetahui dan memonitor

penggunaan dana yang berasal dari APBD, mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, dan untuk melahirkan kompetisi yang kondusif diantara daerah dan menggerakkan tumbuhnya inovasi baru.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana alam yang melanda seluruh negara di Dunia. Virus Covid-19 ini menjadi pusat perhatian dikarenakan muncul di tahun 2019 tepatnya di Kota Wuhan, China. Pada bulan Maret 2020 kemudian Pandemi Covid-19 ini menyebar pesat di Seluruh Indonesia. Penyebaran Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan. Akan tetapi fenomena ini lebih berdampak pada sektor perekonomian, kesehatan dan sosial pada masyarakat baik di tingkat pemerintah maupun swasta. Perekonomian yang terjadi di Jawa Timur yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada Indonesia di setiap masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya akibat adanya Pandemi Covid-19. Melihat perekonomian yang tinggi di dalam masyarakat tentunya tolak ukurnya yaitu dengan menggunakan pendapatan yang dimana ketika pendapatan meningkat dalam 1 satuan juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam 1 satuan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 38 Tahun 2018 “anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dalam membantu perekonomian masyarakat yang ada. Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan dalam mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencegah penyebaran pandemi dan membantu masyarakat sekitar yang terdampak pandemi. Karena pada dasarnya APBD yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah diharuskan lebih mampu dan baik dalam mengeksplorasi sumber keuangan, terutama untuk memenuhi seluruh keperluan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya, melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rosidin, 2019 : 223).

Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah karena semakin hari masyarakat mengalami permasalahan ekonomi sudah mulai terlihat akibat yang ditimbulkan oleh Virus Covid-19. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian di suatu daerah pada periode tertentu. Di dalam pertumbuhan ekonomi tentunya menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari ketiga komponen tersebut, indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

tentunya adalah pendapatan. Pendapatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai penunjang dalam pembangunan negara.

Sebelum adanya gejala penyakit Covid-19, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada daerah kabupaten dan kota maju ataupun tertinggal tidak begitu mengalami krisis ekonomi yang begitu besar sehingga terus meningkatkan kapasitas pendapatan yang ada dan meningkat daripada tahun sebelumnya. Artinya dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dengan melakukan aktivitas masyarakat tidak memiliki batasan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa yang berperan penting terhadap adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berasal dari pendapatan yaitu yang berasal dari sektor pengolahan (29,03%), perdagangan (18,18%) serta pertanian (12,80%). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melalui kenaikan output yang terjadi dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan hasil pendapatan per kapita yang dihasilkan oleh masing-masing daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah yaitu seperti Kota Malang yang merupakan kota wisata karena beragam wisata yang dikunjungi dari luar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk belanja modal tidak berpengaruh begitu besar karena tidak terlalu banyak pengeluaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan yang ada pada

daerah tersebut. Selain itu proses kontribusi atas pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik.

Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, PAD adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi dapat kita hitung dengan kenaikan output dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi baik jasa maupun barang di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan banyak sekali pola hidup masyarakat yang mengkonsumsi akan barang dan jasa. Sehingga banyak yang meningkat dari pola hidup masyarakat yang semakin hari mengalami peningkatan.

Setelah pandemi Covid-19 masuk ke negara Indonesia pada tahun 2020, pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat semakin menurun. Pernyataan ini dibuktikan dengan laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Tentunya ini didasarkan karena pendapatan yang dihasilkan di suatu daerah semakin berkurang yang kemudian menyebabkan pengeluaran juga berkurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi kepada masyarakat yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Timur. Pandemi yang meningkat di Provinsi Jawa Timur menyebabkan perekonomian dari pendapatan mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi pada perekonomian di suatu daerah. Penurunan secara dalam atas perekonomian nasional yang terjadi pada kuartal I sampai kuartal IV tahun 2020 menurun bahkan hasil penurunan tersebut bersifat negatif. Selain itu penurunan ini mengakibatkan kontraksi yang terjadi cukup besar sehingga pemerintah harus melakukan refocusing dan realokasi kembali dikarenakan adanya perlambatan yang terjadi di seluruh sektor sehingga menyebabkan pengeluaran yang harus digunakan dalam belanja harus lebih difokuskan pada pemulihan dan peningkatan ekonomi serta khususnya di bidang sektor kesehatan. Karena adanya pandemi membuat pertumbuhan ekonomi lebih lambat maka yang harus lebih dilakukan yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur lebih sigap lagi dalam mengendalikan kestabilan ekonomi yang ada.

Kasus ini mengakibatkan kurangnya atau bahkan melumpuhkan ekonomi sehingga menyebabkan kemiskinan. Dari kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi pengangguran. Hal ini tentunya menimbulkan perhatian yang sangat besar kepada pemerintah daerah dengan memberikan penanganan yang serius akibat pandemi Covid-19 melalui bantuan dari belanja langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bantuan yang dianggarkan saat ini bagi daerah yang ada di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tidak mencakup kepada masyarakat yang perekonomiannya sangat rendah. Akibatnya banyak timbul ketidakpuasan

dari masyarakat terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan. Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik, sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Sebagian masyarakat daerah di masing-masing Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang dimana sumber daya alam dan tentunya memiliki sumber daya manusia melimpah diharapkan mampu mengelola secara maksimal dan juga mampu mengembangkan bidang termasuk di dalam pembangunan infrastruktur. Tentunya pemerintah daerah harus membuat kebijakan dalam pengalokasian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus lebih lagi difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini merupakan cara untuk meningkatkan kemandirian daerah dari peran anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Akan tetapi masyarakat daerah yang terdapat di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur kurang mengembangkan potensi lokalnya sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasakan dirugikan maupun diuntungkan. Oleh sebab itu perlu kiranya pemerintah harus melakukan pemerataan sumber daya alam dan beberapa program yang unggul demi menciptakan daerah yang

mandiri. Dengan adanya kegiatan tersebut kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tentunya jika di suatu daerah pertumbuhan ekonomi meningkat secara otomatis masyarakat akan hidup sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila telah terpenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan social sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta masyarakat akan sejahtera apabila output perkapita mengalami kenaikan dengan melihat produk domestik regional bruto atau PDRB perkapita.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang dikemukakan oleh Handayani & Erinos (2020) belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Nurul Imamah (2018) menyatakan sebaliknya belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan. Menurut Permendagri Nomer 38 Tahun 2018 “penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih fokus kepada kegiatan yang berorientasi produktif dan mempunyai manfaat untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM)”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lily Kusuma-wati, I Gusti Bagus Wiksuana (2020) dan T Nurhidayah dan P Hendikawati (2018) PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Kartika Jannah, M. Nasir (2020) mengatakan bahwa PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi karena hasil nilai probabilitas 0,4685 nilai ini lebih

tinggi dari critical value yaitu 0,10

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa Pendapatan dan Belanja Daerah sangat penting dilakukan uji yang dimana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19**”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kabupaten dan kota yang teletak di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini tentunya tercipta dari potensi lokar dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Tentunya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah kabupaten maupun kota dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Akan tetapi, pendapatan merupakan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pembangunan negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dimaksudkan diatas, maka rumusan masalah yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan daerah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah pendapatan dan belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 pada Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian

ini adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang analisis pendapatan dan belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 pada Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan mengenai pemerintahan daerah yang dimana sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah serta pengalokasian belanja daerah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan bahan masukan, pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan kepada staf/aparat pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan belanja daerah di masa pandemi covid-19 dalam mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga bisa mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah yang nantinya mengatur dan mengelola keuangan daerah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak civitas akademika tentang pengelolaan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih menelaah khususnya dalam pengelolaan pendapatan dalam belanja daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian bertujuan untuk mengetahui penafsiran yang luas terhadap sasaran penelitian. Oleh karena itu, supaya lebih terarahnya pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini dimana topik ini hanya terbatas pada Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.